

# INTEGRITAS KEBANGSAAN GENERASI MUDA DI KOTA AMBON

*Sabara*

Peneliti Balai Litbang Agama Makassar  
Jalan AP. Pettarani No. 72 Makassar  
Email: barackfilsafat@yahoo.co.id

## Abstrak

Penelitian ini berfokus pada integritas kebangsaan generasi muda di Kota Ambon. Fokus riset tersebut diturunkan dalam 2 rumusan masalah yaitu: bagaimana nasionalisme generasi muda dan penyikapannya terhadap kepelbagaian pada generasi muda di Kota Ambon. Adanya gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) dan konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Maluku, khususnya Kota Ambon menjadi ujian bagi integritas kebangsaan masyarakat. Penelitian ini menemukan, nasionalisme generasi muda di Kota Ambon terbilang cukup tinggi. Gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) dan konflik agama yang pernah terjadi antara 1999-2004 tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan dalam menggerus nasionalisme generasi muda Ambon. Persoalan terjadi pada penerimaan akan kepelbagaian baik agama maupun etnik. Segregasi pemukiman berdasarkan agama pasca konflik membuat ruang sosial perjumpaan dan pembauran menjadi terbatas sehingga memicu stigma dan rasa curiga antar masing-masing pihak.

**Kata kunci:** integritas kebangsaan, generasi muda, nasionalisme, kepelbagaian, Ambon

## PENDAHULUAN

Penelitian ini mengambil Kota Ambon sebagai salah satu Kota yang pernah mengalami konflik kolosal berbasis agama kisaran 1999-2004. Selain itu, di Kota Ambon juga pernah terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan di tahun 1950, dan sisa-sisa pengaruh separatisme RMS masih terasa dalam bentuk simpati sebagian masyarakat Ambon setidaknya dibuktikan dengan masih adanya peringatan hari ulang tahun RMS setiap 25 April.

Konflik Ambon yang dimulai 1999 dan berlangsung hingga 2004 adalah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia. Konflik tersebut adalah peristiwa terburuk dalam lembaran sejarah hubungan sosial bermasyarakat dan beragama (khususnya antara Islam dan Kristen) di Indonesia. Konflik Ambon yang kemudian meluas menjadi konflik Maluku telah menceraiberaikan dasar-dasar kemanusiaan. Peristiwa kelam ini bukan saja telah menghancurkan relasi,

struktur, tatanan kultural, dan sistem sosial masyarakatnya seperti jatuhnya korban jiwa, harta benda yang tak terkirakan, tetapi juga telah meluluhlantakkan bangunan sendi-sendi budaya, etika, norma dan moral kemanusiaan sebagai nilai universal tertinggi yang menjadi pijakan manusia dalam kehidupan.

Berdasarkan pada pengalaman konflik Maluku 1999 tersebut, masyarakat Maluku menggantung harapan agar konflik tidak lagi terjadi. Beberapa orang yang peneliti temui dan berasal dari kalangan rakyat kecil mengatakan, peristiwa konflik Maluku cukup sekali itu saja terjadi dan semoga tidak pernah terjadi lagi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya rekonsiliasi sosial dengan menata dan membangun kembali relasi sosial serta nilai-nilai kemanusiaan yang telah hancur akibat konflik tersebut dengan menjadikan agama sebagai pijakan dasar. Upaya rekonsiliasi tersebut tentu saja perlu melibatkan seluruh elemen kelompok agama, utamanya kelompok keagamaan Islam dan kelompok keagamaan Kristen.

Berdasarkan sejarah adanya gerakan sepratisme dan pengalaman konflik beruansa agama, menarik untuk dicermati perkembangan semangat nasionalisme generasi muda Ambon. Integritas kebangsaan kemudian diturunkan dalam dua rumusan masalah, yaitu; bagaimana nasionalisme generasi muda di Kota Ambon dan bagaimana penyikap generasi muda terhadap realitas kepelbagaian di Kota Ambon. Integritas kebangsaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komitmen, loyalitas, kesungguhan, yang diwujudkan dalam sikap aktif dalam kerangka kebangsaan dan kebhinekaan. Integritas dikaitkan langsung secara personal kepada individu generasi muda sebagai subjek penelitian ini. Generasi muda adalah kalangan generasi milenial atau generasi Y yaitu, generasi yang lahir antara tahun 1982-2000 yang bermukim di Kota Ambon.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Integritas Kebangsaan

Integritas berasal dari bahasa latin, *integer* yang artinya utuh atau lengkap, secara etimologis integritas bermakna keutuhan/kesatuan pikiran, perkataan, dan tindakan yang didasarkan pada konsistensi karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Menurut Gea (2014:952), integritas adalah sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Dengan demikian, integritas adalah kualitas personal yang kembali pada individu-individu yang didasarkan pada keutuhan dan kekuatan karakter personal.

Integritas kebangsaan didasarkan pada

wawasan kebangsaan yang menurut Suhady dan Sinaga (2006:24) memiliki 6 dimensi nilai dasar wawasan kebangsaan: yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu: *Pertama*, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. *Ketiga*, cinta akan tanah air dan bangsa. *Keempat*, demokrasi dan kedaulatan rakyat. *Kelima*, kesetiakawanan sosial. *Keenam*, masyarakat adil makmur. Ada 4 konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

### Teori Nasionalisme

Nasionalisme adalah satu komunitas politik yang terbayangkan dan terbayangkan di mana secara inheren memiliki keterbatasan tetapi berdaulat yang memiliki legitimasi emosional. Meski pun sesama warga dari sebuah bangsa tidak saling mengenal, mereka memiliki tali ikatan persaudaraan dan persamaan (*the image of communion*). Ikatan persaudaraan horisontal menjadi satu dasar bagi anggota sebuah bangsa mengikatkan diri di dalam entitas satu bangsa (Anderson, 1991:3).

Anderson (dalam Damanik, 2010:20) menyebutkan, budaya, agama, bahasa dan sejarah dinasti bisa menjadi dasar pembentukan bangsa atau masyarakat terbayang (*the imagined community*). Kolonialisme yang datang dengan budaya, bahasa dan agama berbeda dengan gampang dapat menyakinkan bangsa yang dijajah untuk menjadi satu entitas yang berbeda karena mereka memiliki akar budaya, kepercayaan, bahasa yang berbeda dari sosok penjajah mereka. Namun, berkaitan

dengan faktor kesamaan ini, Laclau mensyaratkan satu elemen “positif” semacam ini harus selalu disertai dengan identitas jenis apa yang mereka tolak jika tidak maka kita akan menjalani resiko mengesensialkan identitas (*essetialising identity*). Oleh karenanya, seluruh kesamaan yang dikatakan Anderson harus dipahami bukan sebagai suatu asimilasi yang total. Identitas adalah suatu yang bergerak terus, dinamis, dan akan sangat bergantung konteksnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengeksplorasi fakta-fakta berkenaan integritas kebangsaan generasi muda di Kota Ambon dengan menyoroti dua hal, yaitu nasionalisme dan penerimaan terhadap kepelbagaian. Observasi, wawancara, dan studi dokumen menjadi metode pengumpulan data. Pengamatan langsung pada kegiatan keseharian generasi muda, wawancara dengan informan dari tokoh pemuda, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Studi dokumen terkait penelitian terdahulu yang selaras dengan tema penelitian ini. Lokasi penelitian di Kota Ambon Provinsi Maluku selama 25 hari pada Agustus dan September 2018.

## **PEMBAHASAN**

### **Ambon dalam *Setting Geo-Demografis, Sosio-kultur, dan Keagamaan***

Di antara semua koloni Belanda di Maluku, Pulau Ambon adalah yang pertama kali dikenal. Ambon mendapatkan prioritas karena menjadi inti dan pusat kekuasaan Belanda di Hindia Timur. Ambon terletak di laut yang oleh orang Portugis disebut “*Archipelago St Lazaro*”. Secara geografis, posisi Ambon berada di tengah linngkaran sepuluh pulau besar dan kecil (Hoevell, 2014:1). Ambon menukil sejarah panjang

kekuasaan dimulai dari kekuasaan kerajaan Ternate melalui anggota keluarga Tomagola hingga abad ke XVII kekuasaan Ternate di Ambon diserahkan dari keluarga Tomagola ke VOC (Andaya, 2015:97).

Kota Ambon mengalami proses sejarah panjang dalam penguasaan kolonial Belanda dan menjadi saksi perlawanan Pattimura dan kawan-kawan melawan Belanda di awal abad XIX. Kemerdekaan Indonesia menjadikan Maluku sebagai salah satu wilayah yang berintegrasi sebagai provinsi kedelapan. Ambon menjadi saksi pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada 1950, yang akhirnya membuat Ambon dan Maluku kembali ke Pangkuan NKRI. Hampir setengah abad berikutnya, Kota Ambon pun menjadi saksi sejarah sebuah konflik berlatar agama yang cukup besar dan panjang selama setidaknya 1999-2003 dan memakan jumlah korban jiwa serta harta yang cukup besar. Kelebihan Kota Ambon, Karena sejak zaman Kolonial Belanda menjadi pilihan untuk dijadikan markas utama pemerintahan di wilayah Maluku. Demikian pula ketika Indonesia merdeka, Kota Ambon menjadi ibukota Provinsi Maluku (Ismail, 2017:48-49).

Letak Kota Ambon berada sebagian wilayah pulau Ambon (sebagian lainnya menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu) dan secara geografis terletak pada posisi: 3<sup>0</sup>-4<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 128<sup>0</sup>-129<sup>0</sup> Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah. Wilayah Kota Ambon seluas 377 Km<sup>2</sup> dan terdiri atas 5 kecamatan. Secara administratif pemerintahan di 5 kecamatan tersebut terbagi atas 25 negeri adat, 5 desa dan 20 kelurahan (BPS Kota Ambon, 2017).

Negeri merupakan satu kesatuan

pemerintahan setingkat desa/kelurahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut raja. Negeri merupakan kesatuan pemerintahan yang bersifat tradisional dan merupakan warisan kultural Maluku di masa lalu. Secara sosio-kultural, Ambon merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Maluku Tengah. Pengelompokan masyarakat berdasarkan keturunan ayan (patrilineal) dalam struktur kampung dikenal dengan istilah “mata rumah” atau *rumatau*. *Rumatau* inilah yang menjadi pokok dan mata rantai utama dalam pemerintahan suatu negeri yang dipimpin oleh klan atau marga tertentu sebagai *rumatau*. Negeri sebagai persekutuan masyarakat adat berbasis teritorial genealogis, menurut Jacob, dibentuk berdasarkan segregasi agama. Negeri Islam yang populer di kalangan Orang Ambon sebagai *negeri salam*, dan negeri-negeri Kristen disebut *negeri sarani* (Rais, 2016).

Banyaknya kekuasaan-kekuasaan kecil di Maluku diikat oleh kesamaan nilai dan model kultur yang sama sebagai penanda kesamaan sosio, historis, dan kultural masyarakat Maluku. Secara kultural, masyarakat Maluku memiliki ikatan kekeluargaan yang disebut *gandong* dan *pela*. *Gandong* dalam tradisi masyarakat Maluku menjadi alat pengikat “ikatan kekeluargaan” antara masyarakat yang beda agama, marga, dan kampong/negeri akibat dari eksodus (Ismail, 2017:63). *Gandong* merupakan ikatan kultur yang didasarkan kesatuan geneologis. *Pela* adalah ikatan cultural yang mengikat secara sosio-historis antara dua negeri/kampung yang berbeda agama (Islam dan Kristen). Selain *gandong* dan *pela* terdapat pula beberapa kearifan lokal Maluku yaitu *masohi*, sebuah proses kerja sama dalam bentuk saling membantu guna menyelesaikan suatu pekerjaan dan hal

itu terjadi atas dasar kesadaran masyarakat (Takaria, 2011:1).

Sebelum kolonial masyarakat Ambon sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat heterogen, heterogenitas sosial di masa sebelum kolonial ditandai oleh perbedaan suku dan kultur etnis yang sangat beragam. Bila dilacak sejarah asal-usulnya sebagian besar mereka sebenarnya bukan penduduk asli Pulau Ambon Lease (Haruku, Saparua, Nusalaut), tetapi hampir semuanya adalah pendatang dari luar, khususnya dari Pulau Seram, Pulau Seram bagi orang Ambon Lease adalah pulau induk (Nusa Ina).

Jika dikelompokkan menurut tempat asal dan urutan kedatangan mereka, masyarakat Ambon bisa dibagi dalam empat kelompok besar. Yaitu: (1) Kelompok Tuni datang dari Pulau Seram dan sekitarnya, (2) Kelompok Wakan yang berasal dari Kepulauan Banda dan Kei (daerah bagian Selatan dan Tenggara), (3) Kelompok Moni yang datang dari daerah bagian Utara seperti Halmahera, Ternate, Tidore, (4) Kelompok Mahu yang datang dari bagian Barat terutama dari Pulau Jawa di antaranya dari Tuban yang pada waktu itu merupakan pusat dari perdagangan dan pengembangan agama Islam di bagian Timur Pulau Jawa. Selain itu pada masa-masa selanjutnya juga datang orang Buton, Arab, dan Tionghoa. Orang Buton misalnya sudah datang ke Ambon lebih dari satu abad yang lalu (Lihat Trijono, 2011:4-6).

Kota Ambon merupakan perjumpaan dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Islam masuk di Pulau Ambon dan Lease dibawa dari Kesultanan Ternate pada awal abad XV setidaknya ditandai dengan berdirinya Masjid Wapau di Negeri Keitetu Jazirah Leihitu yang diklaim berdiri pada 1414. Pada masa-masa selanjutnya hampir seluruh negeri di wilayah Pulau Ambon dan

sekitarnya mennganut agama Islam hingga kedatangan Belanda. Awal abad XVII VOC datang ke Pulau Ambon dan mendirikan gereja pertama yang bernama Gereja Immanuel pada 1605 yang lokasinya tak jauh dari lokasi Masjid Tua Wapaue.

Sejak saat itu dimulai proses Kristenisasi pada sebagian wilayah Maluku, khususnya Pulau Ambon dan berhasil mengkristenkan sebagian besar negeri di Jaziran Leitimur (yang nantinya menjadi wilayah Kota Ambon) dan sebagian negeri di Jazirah Leihitu (yang nantinya menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tengah). Sejak saat itu penduduk Ambon terbelah ke dalam dua agama besar dengan proporsi jumlah penganut Kristen lebih banyak dari penganut Islam.

Disebutkan pada 1862 jumlah penduduk Muslim di Kepulauan Ambon sebanyak 28,3% atau berjumlah 16.693 jiwa dari total 58.893 jiwa penduduk pada masa itu (Kadir, 2009:69). Wilayah Leitimur yang nantinya menjadi wilayah Kota Ambon hanya satu dari 25 negeri yang penduduknya muslim, yaitu Negeri Batumerah, 24 negeri lainnya berpenduduk Kristen. Meski berbeda dalam anutan agama, penduduk Maluku, Ambon khususnya diikat oleh ikatan kultural sebagai pengikat kohesi sosial di antara mereka, yaitu *pela* dan *gandong*. Negeri Batumerah yang muslim misalnya memiliki hubungan *pela* dengan Negeri Passo dan memiliki hubungan *gandong* dengan Negeri Ema. Umat Islam menyebut umat Kristiani dengan sebutan *basudara Sarani* sebaliknya umat Kristen menyebut umat Islam dengan sebutan *basudara Salam*. Hubungan kedua agama mengalami antiklimaks ketika terjadi kerusuhan besar yang dimulai Januari 1999 hingga 2004.

Sebelum kerusuhan, komposisi penduduk Kota Ambon pada 1995 menurut

agama adalah Kristen sebagai penganut agama terbesar, 52,93% sedangkan umat Islam, 41,71%, Katolik 5,23%, sisanya adalah Hindu dan Buddha (Trijono, 2001:15). Kristen dianut oleh umumnya anak negeri di Ambon serta pendatang dari wilayah Maluku lainnya. Umat Islam umumnya dianut oleh pendatang dari wilayah Maluku lainnya yang menganut Islam serta pendatang dari Buton dan Bugis-Makassar. Umat Katolik umumnya berasal dari Maluku Tenggara yang merupakan pusat Katolik di wilayah Kepulauan Maluku.

Terdapat sedikit perbedaan data penganut agama antara BPS dan Kementerian Agama kota Ambon. Menurut data BPS Kota Ambon 2017, penganut agama terbanyak adalah Kristen, 172.985 jiwa atau 47,68%, umat Islam, 167.136 jiwa atau 46,06%, penganut Katolik sebanyak 21.767 atau 6,00%, sisanya Hindu (667 jiwa) dan Buddha (275 jiwa) atau 0,18% dan 0,06%.

Versi Kementerian Agama Kota Ambon umat Islam adalah penganut agama terbanyak yaitu 195.717 jiwa atau 49,99%, umat Kristen sebanyak 173.076 jiwa atau 44,21%, penganut Katolik sebanyak 22.123 jiwa atau 5,65%, penganut Hindu sebanyak 348 jiwa dan umat Buddha sebanyak 224 jiwa atau masing-masing 0,09% dan 0,06%. Umat Islam menjadi penganut terbanyak di Kecamatan Sirimau, Teluk Baguala, dan sedikit lebih banyak di Teluk Ambon. Umat Kristen mayoritas di Kecamatan Nusaniwe dan 100% di Kecamatan Leitimur Selatan.

Perbedaan data antara BPS dan Kementerian Agama juga terjadi pada jumlah rumah ibadat. Menurut data BPS jumlah rumah, ibadat umat Islam sebanyak 185 buah yang terdiri atas 140 masjid dan 45 mushalla sedangkan versi Kementerian agama rumah ibadat umat Islam sebanyak

201 buah yang terdiri atas 142 mesjid, 12 langgar dan 47 mushalla. Menurut BPS, jumlah gereja Kristen sebanyak 292 buah sedangkan menurut versi Kementerian Agama hanya 279 buah. Menurut BPS, jumlah rumah ibadat Katolik hanya 24 buah yang terdiri atas gereja delapan buah dan kapel 16 buah, sedangkan versi Kementerian Agama jumlah rumah ibadat penganut Katolik sebanyak 36 buah yang terdiri atas 20 gereja dan 16 kapel. Jumlah pura dan vihara untuk umat Hindu dan Buddha antara versi Kementerian Agama dan BPS masing-masing dua buah.

Di Kota Ambon terdapat dua perguruan tinggi agama negeri, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang tahun 2015 berubah status dari STAIN dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) yang pada bulan Maret 2018 telah beralih status menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.

### **Nasionalisme Anak Muda Ambon**

Maluku merupakan salah satu wilayah yang pernah bergejolak dengan separatism, yaitu Republik Maluku Selatan (RMS), meski telah ditumpas pada 1960-an dan pemimpinnya, Dr. Soumokil telah dieksekusi, namun sebagai organisasi, RMS masih eksis meski tidak melakukan perlawanan militer lagi. Hingga saat ini, setiap 25 April oleh beberapa pihak masih diperingati sebagai hari ulang tahun RMS.

Menurut Rukmy (2006:51), segelintir tokoh RMS menggunakan kesempatan konflik Maluku untuk memengaruhi generasi muda demi menghidupkan kembali gerakan yang telah lama mati. Sebagian kalangan menilai, RMS bermain dalam konflik Maluku, meski rumor itu dibantah oleh berbagai kalangan. Misalnya, Waileruny (lihat, 2011:202-215), mengatakan, tidak

mungkin RMS punya kekuatan yang besar untuk bisa menggerakkan sebuah konflik yang besar. Waileruny juga membantah RMS identik dengan Kristen Maluku, karena tidak semua RMS itu Kristen. Ada juga orang-orang Maluku Muslim yang bergabung dengan RMS.

Pengaruh gerakan separatism RMS, konflik di Maluku, problematika kemiskinan, dan persoalan lainnya dianggap sebagai variabel yang melemahkan nasioanlisme masyarakat Maluku, khususnya generasi muda. Seorang informan, Elsy Latuheru Syatuta, seorang penggiat perdamaian di Maluku menyatakan bahwa ia sendiri selama sekitar 6 tahun merasa muak dengan negara dan selama 6 tahun tersebut, dia tidak pernah mau lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pengalaman pahit di masa konflik dan di mana negara tidak hadir untuk masyarakatnya pada saat itu membuat seorang Elsy merasa muak dengan negara. Rasa benci kepada tentara ia juga sempat rasakan karena melihat tentara yang tidak melakukan apa-apa ketika kejadian konflik Maluku, bahkan terlibat dalam memperbesar eskalasi konflik. Pada perjalanannya Elsy menyadari, salah jika ia terus-terusan seperti itu, akhirnya ia mendirikan sebuah lembaga yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi pasca konflik Maluku, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurut Elsy, tidak sedikit generasi muda yang merasakan seperti yang ia rasakan terkait nasionalisme dan kesediaan untuk hidup dalam kepelbagaian. Mereka yang pada saat konflik masih berusia anak-anak masih mengingat dan berpengaruh dalam kesadaran mereka terkait konflik yang telah meluluhlantahkan semua tatanan masyarakat Maluku. Nasionalisme anak-anak muda yang pernah ia dampingi pun dirasakan seperti yang pernah ia rasakan,

namun dengan program-program yang ia lakukan bersama rekan-rekannya berusaha member *trauma healing* kepada generasi muda dan menumbuhkan kembali di antaranya semangat nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia.

RMS sebagai sebuah gerakan separatis sudah tidak punya lagi kekuatan militer, namun memori tentang RMS senantiasa terjadi setidaknya pada 25 April di beberapa titik dikibarkan bendera RMS. Menurut Insany, reporter INews dan ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Maluku mengatakan, 25 April bagi para jurnalis adalah hari “berburu” bendera. Bendera-bendera RMS berkibar di beberapa titik meski tidak lama akan diturunkan kembali oleh aparat atau masyarakat sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa separatisme RMS masih belum benar-benar mati dan sangat mungkin menjadi “bahaya laten” yang setiap saat bisa menggerus nasionalisme generasi muda di Maluku meski secara politik dan militer, RMS bukan lagi sebagai gerakan separatis yang berbahaya bagi integrasi Maluku pada NKRI.

RMS, menurut Arsal Rizal Tuasikal, Pengurus Yayasan Masjid Al-Fatah, tidaklah identik dengan Kristen, meski sebagian besar tokoh RMS adalah tokoh Maluku Kristen, tapi di dalam RMS juga ada orang-orang Muslim Maluku. RMS mengapa tetap eksis, selama pemerintah Indonesia tidak benar-benar menunjukkan *political will* untuk membangun Maluku dengan baik dan memanusiakan manusia Maluku, maka memori dan simpati terhadap RMS itu senantiasa terjaga.

Sampai hari ini, RMS hanyalah sebuah kelompok yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Berkenaan dengan RMS sendiri menurut Yance Z. Rumahuru, saat ini

hanyalah persoalan identitas ke-Maluku-an, tidak berkenaan langsung dengan gerakan separatisme makar terhadap Republik Indonesia.

Nasionalisme pada kalangan Kristen di Maluku, menurut Abidin Wakano, harus dipahami dengan pendekatan historis. Pada zaman penjajahan Belanda, kalangan Kristen Maluku mendapatkan beragam keistimewaan di bidang pendidikan dan pemerintahan. Ketika Maluku integrasi dengan Indonesia terjadi, kalangan Kristen Maluku terpinggirkan baik dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Ekonomi dikuasai oleh kalangan pendatang, khususnya etnis Buton, Bugis dan Makassar (BBM) sedangkan sector pemerintahan dikuasai oleh orang Maluku Muslim. Perasaan ketidakadilan yang dirasakan, akibat perbedaan suasana yang dirasakan pada masa pemerintahan kolonial dan ketika berintegrasi dengan NKRI, membuat munculnya semacam krisis kepercayaan kepada pemerintah Indonesia, sehingga hal ini menjadi faktor bagi “kurangnya” nasionalisme di kalangan Maluku Kristen.

Pengurus KNPI Ambon, Yahya Apono, menyatakan, faktor merasa belum mendapatkan keadilan serta ketidakpercayaan pada aparat membuat nasionalisme di kalangan generasi muda Maluku, khususnya generasi muda Kristen baru pada level normatif belum sepenuhnya pada level sikap aktif. Hal ini juga dibenarkan oleh Ilham Sipahutar (Ketua KNPI Ambon) yang mengatakan bahwa pada dasarnya nasionalisme di kalangan generasi muda Ambon cukup tinggi namun masih perlu penguatan dan penghayatan nasionalisme pada ranah sikap aktif, karena kecenderungan sikap apatis masih kuat di kalangan mereka jika berbicara mengenai sikap aktif menjaga dan membela NKRI dan

Pancasila.

Di antara persoalan nasionalisme generasi muda Ambon adalah kecenderungan pada produk luar. Hatib Abdul Kadir (2009) menjelaskan, kecenderungan *europan style* merupakan kecenderungan khas anak muda Ambon, sehingga kecenderungan mengutamakan produk Barat dibandingkan produk dalam negeri menjadi konsekuensi logis. Menurut Yahya Apono, imaji anak-anak muda Maluku telah terkooptasi oleh produk-produk *branded* dari Barat sehingga menganggap produk-produk dalam negeri sebagai kebalikannya. Kecenderungan gaya hidup anak muda Ambon yang “*stylish*” tersebut yang mempertegas kenapa kecenderungan anak muda Ambon cenderung mengutamakan produk luar dibandingkan produk dalam negeri.

### **Realita Kepelbagaian Pasca Konflik**

Di antara tiga variabel integritas kebangsaan yang ditanyakan, variabel integritas pada kebhinekaan adalah yang paling rendah angka indeksinya. Hal ini bisa dipahami sebagai akibat dari konflik yang pernah terjadi dan bias dari segregasi pemukiman yang terjadi pasca konflik.

Pasca disepakatinya perjanjian damai dalam Perjanjian Malino II tahun 2002 eskalasi konflik masih berlangsung setidaknya beberapa kali dan yang dianggap sebagai letupan terakhir pada 11 September 2011, namun tidak sampai merembet dalam konflik yang berskala besar. Setelah itu secara umum kondisi hubungan sosial dan kehidupan beragama masyarakat Ambon dapat disebut telah normal dan pulih kembali. Akan tetapi kondisi normal dan pulih tersebut jika kita telusuri secara mendalam tidak lantas membuat masyarakat Ambon merasa aman dalam menjalani

kehidupannya dalam kepelbagaian. Rasa khawatir, curiga-mencurigai justru masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat beragama di Maluku. Konflik sporadis yang terjadi akhir-akhir ini di Ambon, seperti konflik politik dan perkelahian pemuda sangat dikhawatirkan akan membangkitkan kembali memori konflik 1999 di mana agama terseret dan masuk dalam pusaran konflik yang tragis tersebut (lihat Rahawarin, 2013:96-97).

Pasca konflik penanganan awal untuk menghindarkan konflik terjadi adalah dengan melakukan segregasi ruang pemukiman berdasarkan agama. Dengan demikian, wilayah Kota Ambon terbagi menjadi zona Muslim, zona Kristen, dan zona batas. Di pusat Kota Ambon pemukiman terbagi dengan segregatif dengan menyisakan zona tapal batas sebagai tempat bertemu dan berinteraksi yang umumnya didasarkan pada transaksi ekonomi di wilayah pasar. Sedikit keluar Kota Ambon terdapat beberapa daerah yang pemukiman masih bercampur antar agama, yaitu di daerah Poka dan Wayame.

Segregasi pemukiman ini dapat dikatakan sebagai solusi sementara, namun jika ini dibiarkan sama saja membiarkan potensi laten konflik tetap tersemayam karena tidak adanya ruang interaksi yang bersifat intim antar kedua penganut agama. Pola segregasi pemukiman ini yang disebut oleh Ismail (2017) sebagai “prahara yang terselubung”.

Ketika peneliti mengkonfirmasi hal ini ke beberapa informan, semuanya mengakui hal tersebut. Seperti dituturkan oleh Fuad Azus seorang pengurus Muhammadiyah Maluku yang menyatakan bahwa konflik Ambon masih berada dalam tataran laten atau dengan istilah “api dalam sekam”, hanya butuh pemantik untuk bisa tersulut kembali. Informan peneliti yang lain, yaitu

Insany, seorang jurnalis yang juga Ketua Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Maluku menyatakan, dengan pola segregasi ini terus-menerus menyebarkan persemaian rasa saling curiga akibat tidak adanya saling interaksi yang bersifat kekeluargaan.

Interaksi yang terjadi hanya terbatas pada ruang dan waktu tertentu dan lebih bersifat mekanistik bukan interaksi yang bersifat organik. Hal yang sama juga dituturkan oleh Abidin Wakano (dosen IAIN Ambon yang juga pengurus NU Maluku), segregasi hanya untuk menjawab kekhawatiran tentang keamanan namun di sisi lain merawat kecurigaan dan trauma yang mendalam di masing-masing pihak. Segregasi pemukiman mengakibatkan segregasi sekolah, di mana anak-anak tidak lagi memiliki interaksi dengan kawan yang beda agama karena sekolah yang ditempati umumnya siswanya beragama homogen.

Segregasi ruang memicu terciptanya ruang segregatif pada ranah persepsi antar masing-masing kelompok agama yang terwujud dalam rasa khawatir dan curiga-mencurigai. Segregasi berdasar agama dapat dianggap lebih buruk dibanding sebelum konflik terjadi pada 1999. Wilayah Utara dihuni oleh penduduk beragama Islam dan wilayah di sebelah selatan dihuni oleh mereka yang beragama Kristen. Segregasi sosial berdasar pada batas-batas kewilayahan ini menjadikan masyarakat Maluku, khususnya Ambon, sulit untuk berintegrasi.

Setelah lebih satu dasawarsa berlalu, ternyata konflik dan kekerasan Maluku masih menunjukkan sifat latennya sehingga kondisi damai yang terjadi ini masih sangat rentan dan sangat memungkinkan untuk konflik terjadi kembali. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan upaya fundamental untuk membangun kembali tatanan sosial

masyarakatnya yang telah hancur ini dengan harapan agar konflik dan kekerasan yang pernah terjadi tidak terulang di masa mendatang dengan menengok kembali seraya mengevaluasi apakah upaya-upaya penyelesaian konflik yang pernah dan sedang dilakukan telah sesuai dengan apa yang mestinya dilakukan. Disadari maupun tidak, konflik Maluku yang terjadi berkepanjangan ini telah menyeret dan melibatkan semua unsur di dalamnya, termasuk agama. Selain faktor segregasi sosial kewilayahan berdasar agama, terseretnya agama selama konflik Maluku 1999 menjadikan integrasi sosial masyarakatnya semakin sulit terwujud sebagaimana sedia kala sebagaimana sebelum konflik terjadi (Rahawarin, 2013:97-98).

Segregasi ruang melahirkan “segregasi imaji” antara masing-masing kelompok agama (Islam dan Kristen). Stigmatisasi adalah hal yang akhirnya lumrah terjadi di antara keduanya karena adanya jarak sosial yang terbangun mengakibatkan minimnya interaksi. Jika pun ada interaksi hanyalah interaksi dalam dunia ekonomi dan kerja, dengan demikian interaksi tidak bersifat intim. Jarak sosial antara kedua komunitas membuat soliditas internal pada masing-masing pihak, melanggengkan trauma, dan memunculkan rasa saling curiga yang tak pernah mendapatkan kesempatan untuk terklarifikasi.

Kita akan sangat mudah membedakan antara Muslim dan Kristen di Ambon, khususnya dari dialek dan sapaan. Di antara komunitas Muslim dan Kristen berbeda dalam sapaan. Di kalangan Kristen, misalnya, untuk laki-laki disapa dengan panggilan “bu” atau “brur”, sedangkan di kalangan Muslim menggunakan sapaan “abang” atau “bang”. Sapaan untuk

perempuan di kalangan Kristen menggunakan sapaan “ussy”, sedangkan untuk kalangan Muslim menggunakan sapaan “chacha”. Kata “beta” dan “ose/ale” sebagai ganti orang pertama dan kedua tunggal masih jamak digunakan di kalangan komunitas Kristen, sedangkan di kalangan Muslim sudah lebih menggunakan kata “ana”/saya dan “ente”/kamu.

Menurut beberapa informan, dari segi intonasi dialek pun sangat mudah dibedakan antara muslim dan Kristen di Maluku. Komunitas Kristen jika berbicara menggunakan tarikan langgam yang cenderung mendayu sebagaimana dialek Ambon yang lazim kita dengar di televisi. Sedangkan di kalangan komunitas muslim, tarikan intonasi bicara cenderung lebih datar.

Segregasi imaji memperlebar jarak ruang akibat stigma dan kecurigaan yang ditimbulkan karena tidak adanya inetraksi antar dua komunitas beda agama tersebut. Seorang informan yang peneliti temui, Frans Pati Herin, seorang wartawan Kompas di Ambon, menceritakan pengalamannya jatuh di Batumerah. Frans Pati Herin adalah seorang Katolik yang tinggal di kawasan Karang Panjang yang merupakan kawasan pemukiman Kristen. Frans menceritakan ketika ia jatuh saat mengendarai sepeda motor saat melewati jalan menanjak di kawasan Batumerah. Frans mengatakan, dia bersyukur jatuh di Batumerah karena selama ini mendapatkan stigma “jangan jatuh di Batumerah”. Karena ketika seorang Kristiani jatuh di Batumerah, maka orang-orang Muslim akan mencelakai mereka bahkan membunuh orang Kristen yang jatuh di tempat tersebut.

Frans menuturkan, ketika ia terjatuh ia sempat didera kekhawatiran tersebut. Hingga seorang ibu menghampiri dia dan memapah dia kemudian ibu tersebut memberi

pertolongan pertama bagi luka-luka yang dialami Frans. Seorang tukang ojek yang ada di sekitar lokasi kemudian mengamankan motornya dan membawa motor yang rusak tersebut ke bengkel, Frans sendiri kemudian diantar pulang oleh seorang tukang ojek ke rumahnya di Karang Panjang. Dari pengalaman tersebut Frans menuturkan bahwa betapa anggapan yang selama ini beredar di kalangan Kristen kepada *basudara* Muslim, khususnya tentang Batumerah sebagai kawasan muslim terbesar di Kota Ambon adalah anggapan yang keliru.

Pengalaman lain diceritakan oleh seorang informan bernama Yahya Yapono, seorang aktivis pemuda muslim di Ambon. Suatu ketika dia mendapatkan tugas untuk melakukan survei di Kawasan Kudamati, sebuah kawasan pemukiman Kristen. Pada awalnya ada rasa takut untuk memasuki kawasan tersebut yang di kalangan muslim disebut sebagai “kawasan *danger*”. Di kalangan Muslim beredar pula stigma, “jangan jatuh di Kudamati”. Yahya menceritakan pengalamannya masuk di lorong-lorong kawasan Kudamati dan mendapatkan sambutan yang hangat, ketika ia masuk ke rumah seorang penduduk dan diketahui bahwa ia adalah seorang Muslim, tuan rumah kemudian menyuguhkan minuman dan makanan kemasan yang diyakini halal untuk dikonsumsi seorang Muslim. Pengalaman tersebut menjadi titik balik bagi Yahya untuk meninggalkan stigma terhadap komunitas Kristen Ambon, khususnya Kudamati.

Cerita tentang “jangan jatuh di Batumerah” dan “jangan jatuh di Kudamati” beberapa kali peneliti dengar. Stigma itu merupakan gambaran betapa jarak sosial melahirkan stigma dan masing-masing pihak kerap bertahan dengan stigma itu.

Pengalaman dari 2 informan yang diceritakan di atas setidaknya memfalsafikasi stigma buruk tersebut. Segregasi pemukiman menjadi "kawasan acang" dan "kawasan obet" melahirkan segregasi sosial hingga pada ruang-ruang imaji pada masing-masing komunitas. Ismail (2017) menyatakan, segregasi ruang jika dilanggengkan akan memperkuat solidaritas keagamaan dan melanggengkan trauma akibat tidak adanya perjumpaan yang intim di antara kedua belah pihak.

Menurut Dr. Syarifuddin, pengurus MUI Maluku menyatakan, bagaimana mungkin terbangun persepsi yang baik dari umat Islam kepada orang-orang Kristen di Ambon karena masih tergambar jelas dalam ingatan masyarakat Muslim Maluku tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada orang Islam. "Bagaimana perasaan anda jika teman baik anda mengkhianati anda? Masihkah kita bisa berprasangka baik kepada mereka?" seperti itulah gambaran yang dirasakan dan dipersepsikan oleh kaum Muslimin Ambon kepada orang-orang Kristen. Persepsi yang masih tertanam menurut Syarifuddin misalnya; "orang Kristen itu menikam dari belakang", "orang Kristen itu pengkhianat", "orang Kristen itu baik di depan tapi jahat di belakang", dan aneka persepsi negatif lainnya.

Hal yang sama juga dituturkan Irwan Musaddaq, Ketua ABI Maluku, yang juga punya pengalaman langsung dalam kerusuhan. Ia mengaku sangat sulit untuk membangun kepercayaan dan persepsi yang positif kepada orang-orang Kristen yang telah melukai hati umat Islam karena melakukan pembantaian terhadap umat Islam di saat umat Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Menurut Irwan, butuh waktu hingga satu atau dua generasi untuk

menghilangkan persepsi negatif tersebut, karena luka yang disebabkan kerusuhan 1999-2004 begitu dalam masih terasa dalam memori umat Islam.

Fuad Azus, aktivis Muhammadiyah Ambon, menyatakan, konflik Ambon sebenarnya adalah bagai "api dalam sekam". Di antara faktor pemicunya adalah persepsi negatif pada masing-masing pihak yang masih kuat terpatri pada pihak lainnya. Khususnya umat Islam, menurut Fuad masih menyimpan kesan buruk akibat trauma yang belum sembuh. Secara pribadi, dia sendiri mempersepsi, bahwa kondisi Ambon tetap masih berada dalam kondisi siaga, karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka rencanakan.

Seorang aktivis Laskar Jihad, Haryanto Adam, menuturkan kepada peneliti bahwa Laskar Jihad dan umat Islam Ambon senantiasa berada berada dalam kondisi siaga, karena umat Kristen sangat sulit untuk dipercaya. Serangan mendadak pada saat Idul Fitri berdarah 1999 merupakan bukti nyata bahwa mereka sangat mungkin untuk melakukan "penikaman" secara tiba-tiba dan akan menimbulkan korban besar dikalangan umat Islam, jika umat Islam tidak bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Serangkaian upaya rekonsiliasi yang dilakukan masih sulit menghapus rasa curiga dan khawatir dari umat Islam.

Selain permasalahan pada relasi antar agama, persoalan yang tak kalah pelik adalah relasi antar etnis, terutama terkait kesediaan bersahabat dengan orang yang berbeda suku/etnik dan kesediaan dipimpin oleh orang yang berbeda suku/etnik. Peneliti melakukan konfirmasi kepada Tajudin Buano, seorang jurnalis Ambon Ekspres yang juga tinggal di Batumerah, beliau menyatakan bahwa memang relasi antar etnis di Batumerah cukup bermasalah, khususnya

antar orang Seram dan orang Buton. Keduanya sering terlibat konflik bahkan pada 2013 sampai terjadi pengrusakan beberapa rumah.

Yance Rumahuru, menjelaskan, relasi antaretnik tidak sekadar dipahami antara “anak negeri” (orang asli Maluku) dengan pendatang, namun juga sesama anak negeri. Solidaritas anak negeri di Maluku setidaknya terbagi dalam ikatan kesatuan Pulau-pulau, seperti Seram, Pulau Ambon, Kei atau Maluku Tenggara, dan Pulau Buru. Pada lapis yang lebih di bawah terjadi ketegangan relasi, misalnya, sesama orang Pulau Ambon, antara orang Jazirah Leihitu dan Leitimur, sesama orang Leihitu pun terjadi lagi antara negeri misalnya antar Negeri Mamala dan Morella, Negeri Set dan Negeri Lima, dan lain-lain.

Yance mengutip sebuah disertasi yang meneliti relasi agama dan etnik di kalangan siswa SMA di Kota Ambon menunjukkan, terjadi permasalahan relasi antar etnik di antara siswa-siswa SMA di Kota Ambon, khususnya pasca Konflik. Hal tersebut mencerminkan adanya jarak sosial antara etnik dan sub etnik di antara penduduk Kota Ambon dan berimbas pada generasi muda.

Dr. Syarifuddin, Dosen IAIN Ambon, yang juga Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, menyatakan, pasca konflik agama adalah konflik intern umat Islam, namun tidak berdasarkan mazhab atau golongan tertentu melainkan konflik antar kampung/negeri muslim. Konflik tersebut sebenarnya telah ada sebelum konflik agama sekaitan dengan konflik antar negeri yang telah berlangsung lama. Konflik tersebut memang tidak terjadi di dalam Kota Ambon namun biasanya hingga ke Kota Ambon karena konflik terjadi antar negeri yang masih berada di Pulau Ambon (masuk dalam Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah).

Sebut saja konflik antar Negeri Mamala dan Morela, serta Negeri Seit dan Negeri Lima yang hingga saat ini masih berlarut-larut dan pengaruhnya hingga ke Kota Ambon karena melibatkan orang-orang dari negeri tersebut yang juga beraktivitas di Kota Ambon. Dengan demikian, problematika kepelbagaian di Kota Ambon, menyisakan dua problema, yaitu problem relasi antar agama dan antar etnik.

## PENUTUP

Nasionalisme generasi muda Kota Ambon berdasarkan temuan ini terbilang sangat tinggi. Gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) dan konflik agama yang pernah terjadi antara 1999-2004 tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan dalam menggerus nasionalisme generasi muda Maluku, Simpati terhadap gerakan separatisme RMS diakui masih ada meski dalam intensitas yang cukup kecil, namun tidak ditunjukkan dalam sikap yang frontal. Demikian pula kaitannya dengan ideologi politik trans-nasional tidak ditemukan signifikansinya pada generasimuda Kota Ambon.

Penerimaan pada kepelbagaian masih menjadi masalah di Ambon, segregasi pemukiman berdasarkan agama pasca konflik membuat ruang sosial perjumpaan dan pembauran menjadi terbatas sehingga memicu stigma dan rasa curiga antar masing-masing pihak. Relasi antar etnik juga menjadi problem, karena pada bagian ini indeks terbilang rendah dibandingkan yang lain. Konflik antar etnik maupun sub etnik atau antar negeri yang masih sering menjadi faktor pemicu terjadinya gap sosial antara etnik dan sub etnik di Kota Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. *Dunia Maluku: Indonesia pada Zaman Modern Awal*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Anderson, BROG. *Imagined Communities, Reflectins on the Orignand Special of Nationalism*, London: Verso,1991
- BPS Kota Ambon. 2017. *Kota Ambon dalam Angka 2017*.
- Gea, Antonius Atosokhi. *Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis* dalam Jurnal *Humaniora* Vol 5 No 2 Oktober 2014 h.950-959.
- Damanik, Ahmad Taufan. *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Jakarta: Friederich Ebert Stiftung [FES]. 2010
- Hoevell, WR Vann. *Sejarah Kepulauan Maluku*. Yogyakarta: Ombak. 2009.
- Ismail, Arifuddin. *Prahara yang Terselubung*. Yogyakarta: Transmedia Grafika. 2017
- Kadir, Hatib Abdul. *Bergaya di Kota Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Rahawarin, Yunus. “Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik di Maluku dan Tual”. Jurnal *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Volume7 Nomor 1 Juni 2013 hal 95-120.
- Rais, Muhammad. “Mimikri Pemuda Ambon” dalam Jurnal; *Mimikri Voume* 1 Nomor 1 tahun 2016.
- Rukmy. *Apa dan Siapa RMS*. Jakarta: Timpani Publishing.2006.
- Suhady, Idup dan AM. Sinaga. 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Takaria, D. *Adat Kebiasaan Orang Maluku*. Ambon: BFP Unpatti. 2011.
- Trijono, Lambang. *Keluar dari Kemelut Maluku*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2001.
- Waileruny, Semuel. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2011.